



Penguatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Analisis SWOT Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bondowoso: Studi Pada Bapperida

Muhammad Kholilur Rohman¹, Anizul Anwar², Denari Dhahana Edtiyarsih³

¹ Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ kholilurrohmanm873@gmail.com, ² Anizul2003@gmail.com, ³ denaridhahana@uinkhas.ac.id

Abstrak

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di BAPPERIDA Kabupaten Bondowoso dengan mengambil fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan pembangunan daerah. Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan PPL, penulis dapat mengetahui secara langsung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, termasuk pengelolaan dan penginputan data kemiskinan ekstrem. Penyusunan laporan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan PPL serta didukung oleh beberapa sumber pustaka yang relevan. Untuk melihat kondisi strategi penanggulangan kemiskinan, digunakan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa BAPPERIDA mempunyai peran dalam membantu proses perencanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Dukungan pemerintah, kerja sama antarperangkat daerah, dan ketersediaan data menjadi hal yang dapat mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kebutuhan pemutakhiran data, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan peluang yang ada serta penguatan koordinasi dan penggunaan data yang lebih akurat diperlukan agar perencanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: kemiskinan; perencanaan pembangunan daerah; analisis SWOT; bapperida, bondowoso

PENDAHULUAN

Perhatian masyarakat internasional terhadap persoalan kemiskinan ekstrem terus mengalami peningkatan. Penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, sekaligus berkaitan erat dengan upaya mengurangi eksklusi sosial, memperkecil kesenjangan pembangunan, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu.

Kondisi kemiskinan nasional di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25 persen atau sebanyak 23,36 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,22 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen dan menurun sebesar 0,32 poin persentase dibandingkan September 2024 yang sebesar 8,57 persen. Meskipun menunjukkan tren penurunan, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai 23,36 juta orang menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih memerlukan perhatian dan kebijakan penanggulangan yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,72 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,60 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik dan ketimpangan antarwilayah.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan, pemerintah kabupaten Bondowoso telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan, dimana salah satunya adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasar garis kemiskinan yang berfluktuasi dan menampilkan pola perkembangan antar waktu dan tren menurun selama 10 tahun terakhir.

Pada tahun 2026, target kemiskinan 11,36 – 11,73 persen dan target kemiskinan ekstrim nol persen di tahun 2026 menjadi dorongan bagi kita semua, untuk meningkatkan upaya percepatan dan kolaborasi semua pihak dalam melakukan intervensi secara tepat sasaran. Kemiskinan ekstrim di kabupaten Bondowoso menurut data dsen per desember 2025, masih terdapat sebanyak 87.032 individu dan 39.419 keluarga dari total penduduk 800.441 jiwa dan 321.522 keluarga, sehingga tentunya diperlukan upaya percepatan yang lebih optimal lagi.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrim. Identifikasi penduduk miskin ekstrim dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Data P3KE merupakan hasil Pendataan Keluarga BKKBN 2021 yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap keluarga di Indonesia. Data tersebut kemudian diperingkat dan dipadukan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024–2026 berfokus pada terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif setiap daerah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

Sejalan dengan itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menargetkan terciptanya pemerataan pembangunan melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah.

BAPPERIDA adalah perangkat daerah berupa lembaga penelitian dan pengembangan yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan negara sesuai kewenangan daerah. Selanjutnya, Bapperida melaksanakan kebijakan inovasi daerah baik di tingkat provinsi maupun administratif/kota.

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi memerlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bondowoso memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus mengoordinasikan program lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan.

Melalui penyusunan dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan RKPD, BAPPERIDA mengintegrasikan isu kemiskinan ke dalam prioritas pembangunan daerah, mengoordinasikan program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selain itu, BAPPERIDA berperan dalam mendukung Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui penyediaan data, sinkronisasi kebijakan, dan penyelarasan program agar setiap intervensi pemerintah lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan yang disusun dan dikoordinasikan oleh BAPPERIDA

Penelitian Setiawan dan Soraya (2025), berfokus pada inovasi digitalisasi layanan kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan Klaten (SAKURA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan dan efektivitas penyaluran program sosial. Selanjutnya, Penelitian Rakhnat (2025), berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah daerah dijalankan melalui pendekatan implementasi kebijakan Edward III, dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Pramudia dkk. (2026) berfokus pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan George C.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji strategi penanggulangan kemiskinan berbasis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bondowoso melalui studi kualitatif pada BAPPERIDA, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses perencanaan, implementasi strategi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat celah penelitian terkait strategi penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya peran BAPPERIDA sebagai lembaga perencana pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BAPPERIDA Kabupaten Bondowoso dalam penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan BAPPERIDA sebagai aktor utama dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis perencanaan pembangunan daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas implementasi program bantuan sosial atau evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, penelitian ini menitikberatkan pada proses penyusunan strategi pembangunan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan daerah di Kabupaten Bondowoso.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian perencanaan pembangunan daerah serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan kemiskinan berbasis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bondowoso melalui kajian berbagai sumber tertulis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi BAPPERIDA Kabupaten Bondowoso, seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan Pengabdian

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan unsur 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Tahapan tersebut dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengumpulan informasi dan data, keterlibatan dalam kegiatan instansi, hingga tahap evaluasi dan penyusunan laporan PPL.

What (Apa yang dilakukan)

Kegiatan PPL difokuskan pada pengamatan dan pengkajian mengenai strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso serta keterkaitannya dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Mahasiswa melakukan pengumpulan informasi mengenai kondisi kemiskinan, program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, informasi yang diperoleh digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) sebagai dasar penyusunan analisis SWOT. Tahap kedua adalah pengenalan lingkungan dan struktur kerja instansi (Who dan Where).

Who (Siapa yang terlibat)

Pihak yang terlibat dalam kegiatan PPL meliputi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan, pembimbing lapangan, serta pegawai Bapperida Kabupaten Bondowoso, khususnya pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Mahasiswa memperoleh informasi melalui arahan, diskusi, wawancara, maupun observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai. Keterlibatan pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran Bapperida dalam merumuskan dan mendukung kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

When (Kapan kegiatan dilakukan)

Kegiatan PPL dilaksanakan selama periode yang telah ditentukan oleh pihak perguruan tinggi dan Bapperida Kabupaten Bondowoso. Selama periode tersebut, mahasiswa mengikuti kegiatan secara rutin sesuai dengan jadwal kerja yang berlaku di instansi. Pengumpulan informasi, observasi, diskusi, dan penyusunan bahan analisis dilakukan secara bertahap selama pelaksanaan PPL sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung kajian mengenai strategi penanggulangan kemiskinan.

Where (Di mana kegiatan dilakukan)

Seluruh kegiatan utama PPL dilaksanakan di Bapperida Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian sekaligus tempat mahasiswa memperoleh pengalaman praktik di lingkungan pemerintahan daerah. Pemilihan Bapperida sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada kedudukannya yang memiliki peran dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan di instansi tersebut, mahasiswa dapat mengamati secara langsung bagaimana isu kemiskinan menjadi bagian dari proses perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bondowoso.

Why (Mengapa kegiatan dilakukan)

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Analisis SWOT digunakan karena dapat membantu mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat diperkuat dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kegiatan PPL tidak hanya memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, tetapi juga menghasilkan kajian yang relevan dengan permasalahan pembangunan daerah.

How (Bagaimana kegiatan dilakukan)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi, wawancara atau diskusi dengan pihak terkait, dokumentasi, serta pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, mahasiswa menyusun gambaran mengenai strategi yang dapat diperkuat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso. Seluruh proses dilakukan dengan mengikuti arahan pembimbing lapangan dan menyesuaikan dengan data serta informasi yang tersedia di Bapperida.



Gambar 1. Penginputan data kemiskinan kabupaten bondowoso

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penanggulangan kemiskinan Berbasis Perencanaan.

Penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2025 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 797.844 jiwa yang terdiri atas 390.208 jiwa penduduk laki-laki dan 407.636 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 0,70%. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2025 sebesar 96, yang artinya di antara 100 perempuan terdapat 96 orang laki-laki. Sedangkan data jumlah penduduk di semester 1 tahun 2026 adalah 802.092 jiwa yang terdiri atas 392.248 jiwa penduduk laki-laki dan 409.844 jiwa penduduk perempuan.

Pada kurun waktu 10 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung menunjukkan penurunan, meski sempat terjadi peningkatan pada tahun 2015-2016 dan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Selama periode Maret 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso berkurang sebanyak 2,91 ribu jiwa, dari 99,62 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 96,71 ribu jiwa pada Maret 2023. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,40 persen, dari 12,60 persen pada Maret 2024 menjadi 12,20 persen pada Maret 2025. Apabila dilihat dari target RPJMD pada tahun 2025 ini angka kemiskinan seharusnya sudah pada + 40 Persen akan tetapi efek pandemi covid tidak bisa terelakkan ditahun 2020 – 2021 terjadi kenaikan yang cukup drastis

Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso dari Rp408.352,00 (tahun 2020) Rp.517.741,00 (Maret 2024) menjadi Rp526.325,00 per kapita per bulan (2025), diantaranya akibat peningkatan harga diberbagai komoditas, terutama komoditas bahan makanan. Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selain penyelesaian data P3KE, upaya percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bondowoso juga dilakukan melalui penyaluran Bantuan Pangan Beras yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Perum Bulog. Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dengan sasaran penerima yang ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial agar bantuan lebih tepat sasaran. Pada alokasi bulan JuniJuli 2025, total bantuan pangan yang disalurkan

di Kabupaten Bondowoso mencapai 2.051.840 kg beras bagi 102.592 Penerima Bantuan Pangan (PBP), dengan masing-masing penerima memperoleh 20 kg beras untuk alokasi dua bulan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso senantiasa berupaya terus memperkuat akurasi data kesejahteraan sosial melalui kegiatan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Permen PPN No. 7 Tahun 2025 tentang Berbagi Pakai Data, yang mengatur peran pusat-daerah, tata kelola, keamanan data, dan prosedur untuk memastikan data terintegrasi, akurat, serta mendukung penyaluran bansos dan program kesejahteraan sosial secara tepat sasaran.

Pemutakhiran DTSEN ini merupakan langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026 lebih tepat sasaran, seiring dengan diberlakukannya aturan nasional baru yang menuntut verifikasi semakin ketat dan terintegrasi. Data DTSEN kini dipadankan dengan NIK dan KK, Melalui kegiatan ini, diharapkan data kesejahteraan sosial dapat semakin valid dan berdaya guna dalam menyusun intervensi yang tepat, efektif, dan adil.

TABEL SEBARAN PENERIMA BANTUAN PANGAN TAHUN 2025

URAIAN	TAHUN 2025
Jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP)	102. 592 Penerima
Total bantuan Beras	2.051 Penerima
Alokasi	Juni – Juli 2025
Sumber Data Penerima	DTSEN Kementerian Sosial

Sumber : Perum Bulog Cabang Bondowoso, 2025

2. hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil analisis SWOT, penguatan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki BAPPERIDA dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia. Kekuatan (*Strengths*) tersebut dapat berupa fungsi BAPPERIDA dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan, ketersediaan data serta dokumen perencanaan, dan adanya kerja sama dengan berbagai perangkat daerah. Kekuatan tersebut perlu diarahkan untuk memanfaatkan peluang berupa dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan data kemiskinan, serta adanya program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, kelemahan (*weaknesses*) seperti keterbatasan atau pemutakhiran data, koordinasi yang belum optimal, dan keterbatasan sumber daya perlu diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program. Dari sisi peluang (*opportunities*), penguatan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso memiliki peluang yang cukup besar karena adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan kemiskinan, tersedianya berbagai program penanggulangan kemiskinan, serta semakin berkembangnya pemanfaatan data sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Bagi BAPPERIDA, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. sedangkan ancaman (*threats*) seperti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan risiko ketidaktepatan sasaran perlu diantisipasi melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, hasil analisis SWOT dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAPPERIDA dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah agar strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penyusunan program, tetapi juga pada ketepatan sasaran, keterpaduan antarprogram, koordinasi antarperangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan di BAPPERIDA Kabupaten Bondowoso, dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai kaitan yang erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan yang dilakukan selama PPL, penulis mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai proses kerja di lingkungan BAPPERIDA, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data dan penginputan data kemiskinan ekstrem. Kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa data yang baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menentukan arah perencanaan pembangunan.

Dari hasil analisis SWOT, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi dasar dalam memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Dari sisi kekuatan, terdapat dukungan pemerintah serta koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah. Sementara itu, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan pemutakhiran data, sumber daya, dan koordinasi. Adapun peluang dapat dimanfaatkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kemungkinan ketidaktepatan sasaran program menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso perlu didukung oleh data yang akurat, koordinasi yang baik, serta perencanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Bagi penulis, kegiatan PPL ini juga memberikan pengalaman bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen, tetapi juga membutuhkan proses pengumpulan data, koordinasi, dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Bapperida Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta fasilitas kepada penulis selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, seluruh pegawai Bapperida Kabupaten Bondowoso, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan arahan, bantuan, dan informasi selama proses pelaksanaan kegiatan. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh pengalaman serta menyelesaikan kegiatan PPL dan penyusunan laporan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Timur Alabshar, Nufi, Lina Agustina Pujiwati, Titik Munawaroh, dan Zainal Fatoni. (2024): “Disabilitas dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Analisis Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020.” *Kawistara: The Journal of Social Sciences and Humanities*: 86–102.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.(2025), *Data Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso
- Fernanda, Reza Agung, (2025) “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.” *Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik* 7, : 42–55.
- Hardiyansyah, Rakhmat, dan Amin Muhammad.(2025), “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.” *Journal Education and Government Wiyata* 3, no. 1: 149–161. [Journal Education and Government Wiyata](#)
- Here, Yupryadi Crystian, (2026), “Relasi Kuasa dan Produksi Pengetahuan dalam Konstruksi Kemiskinan: Studi pada RT 9 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.(2025) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas,
- Kholid, Amin Nur.(2025), “Standar Garis Kemiskinan dalam Perspektif Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* : 492–494.
- Pramudia, Erdianzah Dicky, (2026), “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*
- Rahmawati, Rauda Siti (2025), “Optimalisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dalam Mengatasi Kemiskinan.” *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, hlm. 667–668.
- Setiawan, Irfan, dan Berti Soraya (2025), “Inovasi Digitalisasi Layanan Kependudukan sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten.” *Jurnal Registratie*: 94–110.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur.(2026), *Lampiran 1: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa,

Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). *Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi-Qu, 12(1)